

Analisis Kinerja Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Ferica Christinawati Putri¹, Ananda Aprillia Salsabila²

¹Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Universitas Borneo Tarakan
Jl. Amal No. 1, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, e-mail: fericacputri@borneo.ac.id

² Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Universitas Borneo Tarakan
Jl. Amal No. 1, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, e-mail: anandasalsabila264@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 30 Mei 2023

Received in revised form 2 Juni 2023

Accepted 10 Juni 2023

Available online 1 Juli 2023

ABSTRACT

This research is a qualitative descriptive study with data collection using documentation techniques and the data used is in the form of Realization Reports of the Regional Revenue and Expenditure Budget of the North Kalimantan Provincial Government. Furthermore, this data is analyzed using financial ratios, namely the growth ratio and compatibility ratio. The results of the study show that there has been an increase in regional spending by the North Kalimantan Provincial Government and the calculation of the compatibility ratio shows that the Regional Government of North Kalimantan Province for the 2020 and 2021 Fiscal Years in allocating their funds for activities prioritizes operational spending, namely 72.19% and 80.35% the comparison is much greater with capital expenditure which is only 27.80% and 19.06%.

Keywords: growth ratio; compatibility ratio

1. Introduction

Pada hakikatnya pemerintah daerah berperan penting atas terlaksananya otonomi daerah yang dimana memberi pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan tercapainya tujuan negara (Putri, 2023). Pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah memiliki peran sebagai aktor dan juga fasilitator yang menjadi penggerak roda perekonomian melalui belanja daerah untuk pembangunan infrastruktur atau pembangunan sarana prasarana masyarakat (Andriani, 2020). Kecakapan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik menjadi salah satu tolak ukur penilaian kinerja keuangan pemerintah dalam menjalankan amanah rakyat (Sholikhah & Wahyudin, 2014).

Tuntutan akuntabilitas dan transparansi sektor publik oleh pemerintah daerah sebagai bentuk tanggung jawab atas tugas sebagai pelayan publik untuk meningkatkan pertumbuhan positif ekonomi yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya memberikan gambaran umum terhadap hal-hal yang menjadi sumber pendapatan daerah, alokasi belanja yang digunakan dengan tujuan membuat kegiatan yang mendukung sumber pendapatan daerah, serta biaya yang dikeluarkan akibat surplus maupun defisit (Andriani, 2020).

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengharuskan untuk melaksanakan proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta memberikan pertanggungjawaban hasil dari segala jenis kegiatan yang telah dilaksanakan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban kepada publik atas dasar memenuhi hak-hak masyarakat.

UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara menjelaskan bahwa setiap provinsi/kota/kabupaten di Indonesia diwajibkan untuk memiliki laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah dibuat untuk menghasilkan informasi yang berkaitan dengan adanya kapasitas sumber daya yang ada di daerah tersebut, melihat jumlah pendapatan yang digunakan sebagai dana dari kegiatan operasional pemerintahan, memberikan penilaian terhadap kondisi keuangan, serta mengevaluasi pemerintah daerah setempat dalam hal efektivitas dan efisiensi entitas pelaporan (Pramono, 2014).

Wewenang yang sudah diberikan kepada pemerintah daerah sebagai pemegang amanah rakyat untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah secara efektif dan efisien telah diwujudkan melalui adanya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Namun, LKPD yang disajikan tidak mampu menggambarkan informasi tentang kondisi keuangan suatu daerah (Ritonga, 2014). Hal tersebut dikarenakan pemangku kepentingan seperti investor, karyawan, Lembaga keuangan, dan masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk menganalisis laporan keuangan (Putri, 2022). Oleh karena itu, diperlukan penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah untuk menghindari adanya kesalahan dalam interpretasi laporan keuangan (Hendriyani & Tahar, 2015).

Anggaran pendapatan yang tercantum di dalam APBD seringkali dengan sengaja dibuat kurang dari kemampuan pendapatan yang mungkin dihasilkan agar realitanya pendapatan yang di laporkan nantinya lebih besar dari anggaran yang telah dibuat, berbanding terbalik dengan belanja yang lebih rentan dalam mengalami inefisiensi dan kebocoran sehingga memungkinkan terjadinya pengeluaran belanja yang lebih jika dibandingkan dengan anggaran. Oleh sebab itu perlu dilakukan analisis kinerja keuangan dengan melihat Laporan Realisasi Anggaran yang memberikan gambaran tentang perbandingan antara anggaran yang dibuat dengan realisasi dalam satu periode pelaporan (Assidiqi, 2016).

Berbagai penelitian telah dilakukan terkait dengan menilai kinerja belanja daerah pemerintah diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Andriani (2020) menyatakan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Sarolangun tahun 2006 – 2012 mengalami pertumbuhan belanja daerah yang positif dengan rata-rata 20,67%. Namun, pada tahun 2010 mengalami pertumbuhan negatif sebesar -11,89%. Untuk perhitungan rasio keserasian antara belanja operasi dan belanja modal, Pemkab Klaten lebih memprioritaskan belanja operasi sedangkan presentase belanja modal masih kecil sekali.

Assidiqi (2016) juga melaksanakan penelitian yang sama tentang penilaian kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Klaten tahun anggaran 2008 – 2012 dan hasilnya menunjukkan pertumbuhan belanja daerah yang positif dengan rata-rata 11%. Jika dilihat berdasarkan rasio keserasian Pemkab Klaten masih mengutamakan sebagian besar pendapatan daerahnya untuk belanja rutin operasional dan hanya seberapa persen digunakan untuk belanja modal.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Palilingan, Sabijono, & Mawikere (2015) menunjukkan bahwa pertumbuhan belanja kota Manado tahun 2009 – 2013 mengalami kecenderungan pertumbuhan yang positif dan pada tahun 2010 mengalami pertumbuhan negatif yaitu sebesar -12,3%, sedangkan untuk perhitungan rasio keserasian pemerintah kota Manado lebih mengutamakan belanja untuk fasilitas masyarakat yang mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun demi meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan publik.

Stewardship Teori mendefinisikan bahwa para manajer dalam situasi yang tidak termotivasi untuk mengutamakan kepentingan individu melainkan bersama – sama memiliki tujuan untuk mengutamakan kebutuhan organisasi (Donaldson & Davis, 1991). Teori ini memiliki hubungan yang kuat antara kepuasan dari pelayanan terhadap keberhasilan organisasi. Keberhasilan dalam organisasi digambarkan dengan maksimalitas dari utilitas kelompok antara prinsipal dan manajemen. Menurut teori *stewardship*, para manajer selalu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan optimalisasi utilitas kelompok

prinsipal serta manajemen. Teori ini menemukan bahwa suatu organisasi akan sukses bila bila organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien sehingga akan berdampak pada kepuasan kepada pengguna layanan dan pengelola organisasi (Muth & Donaldson, 1998). Penerapan *stewardship* teori dalam penelitian ini yaitu untuk menggambarkan hubungan antara pemerintah sebagai organisasi yang dipercaya oleh publik untuk menjalankan tugas dan wewenang dengan baik untuk mencapai kesejahteraan di dalam lingkungan masyarakat.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis kinerja belanja Pemerintah Daerah Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020 – 2021 untuk mengetahui keberhasilan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan serta mengetahui kemampuan pemda dalam memberdayakan aset yang dimiliki daerah dengan menggunakan Rasio Pertumbuhan Belanja dan Rasio Keserasian.

2. Research Method

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu suatu teknik yang mendeskripsikan dan menginterpretasikan makna dari setiap data yang telah terkumpulkan dengan cara memberikan observasi sebanyak mungkin mengenai aspek dari setiap situasi yang diteliti sehingga dapat memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh mengenai keadaan yang sebenarnya (Kriyantono, 2007). Metode deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsikan karakteristik dari suatu populasi tentang suatu fenomena yang diamati. Penggunaan metode deskriptif berarti melakukan analisa data yang dikumpulkan melalui kata-kata, gambar dan angka-angka. Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2020-2021. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari rasio pertumbuhan belanja daerah dan rasio keserasian.

3. Results and Analysis

3.1 Analisis Rasio Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja daerah digunakan untuk mengukur seberapa besar pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun. Belanja daerah memiliki kecenderungan untuk mengalami kenaikan dan penurunan menyesuaikan dengan adanya inflasi, perubahan pada nilai tukar rupiah, perubahan kapasitas pelayanan, dan menyesuaikan pada faktor makro ekonomi (Assidiqi, 2016). Perubahan kenaikan yang wajar atau tidak perlu memperhatikan faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya dan melihat alasan terjadinya kenaikan tersebut, apakah kenaikan terjadi karena faktor internal yang terencana atau faktor eksternal diluar kendali pemerintah (Mahmudi, 2010). Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode satu ke periode berikutnya, baik dilihat dari sumber pendapatan maupun pengeluaran.

Berikut ini analisis rasio pertumbuhan belanja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020 – 2021.

Tabel 1. Perhitungan Rasio Pertumbuhan Belanja Tahun Anggaran 2020 – 2021

Uraian	Realisasi Belanja Tahun 2020	Realisasi Belanja Tahun 2021	Pertumbuhan	
			Kenaikan (Penurunan)	/ %
BELANJA DAERAH	2.392.576.073.246,86	2.050.044.253.908,86	(342.531.819.338)	- 14,31
BELANJA OPERASI	1.727.405.179.222,86	1.647.219.558.627,47	(118.183.050.014)	- 6,84
Belanja Pegawai	567.086.139.979,69	638.555.013.259,27	71.468.873.050.014	12,60
Belanja Barang dan Jasa	738.461.268.648,66	787.157.711.061,20	48.696.442.412,54	6,59

Analisis Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Feric Christinawati Putri)

Uraian	Realisasi Belanja Tahun 2020	Realisasi Belanja Tahun 2021	Pertumbuhan	
			Kenaikan (Penurunan)	/ %
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	21.188.660.225,92	21.167.303.205,00	(21.357.020,92)	-0,10
Belanja Hibah	392.994.966.648,78	199.114.237.682,00	(193.880.728.966,7)	-49,33
Belanja Bantuan Sosial	7.674.143.719,00	1.225.293.420,00	(6.448.850.299)	-84,01
BELANJA MODAL	665.170.894.024,81	390.900.388.868,39	(274.270.505.156,4)	-41,23
Belanja Modal Tanah	57.360.558.808,00	23.338.573.244,00	(34.021.984.958)	-59,31
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	177.052.283.093,27	95.562.120.412,00	(81.490.162.681,27)	-46,02
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	264.776.690.040,54	173.436.399.485,39	(91.340.290.555,15)	-34,49
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	151.910.691.099,00	76.752.834.826,00	(75.157.856.273)	-49,47
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.129.830.595,00	21.810.460.901,00	14.680.630.306	2,05
Belanja Modal Aset Lainnya	6.940.840.389,00	0,00	(6.940.840.389,00)	-1
BELANJA TAK TERDUGA	0,00	11.924.306.413,00	11.924.306.413,00	-
JUMLAH BELANJA	2.392.576.073.246,86	2.050.044.253.908,86	(342.531.819.338)	-14,31

Sumber data : Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara 2023 (diolah)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa secara keseluruhan pertumbuhan belanja daerah untuk tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp 342.531.819.338 atau -14.31 % dari tahun anggaran 2020. Belanja yang paling mempengaruhi adanya kenaikan pertumbuhan jumlah belanja Tahun Anggaran 2021 adalah belanja pegawai sebesar 12,60 %. Sebaliknya, belanja yang mengalami pertumbuhan terendah yaitu belanja bantuan sosial yaitu sebesar -84,01 %. Berdasarkan hasil analisis tersebut menunjukkan pertumbuhan belanja yang cenderung negatif.

3.2 Analisis Rasio Keserasian

Analisis rasio keserasian merupakan rasio yang digunakan untuk menjelaskan segala jenis aktivitas pemerintah daerah dalam memprioritaskan penggunaan dananya pada dua macam belanja yaitu, belanja rutin dan belanja modal yang dapat digunakan untuk menambah aset daerah (Prmono, 2014). Semakin tinggi alokasi dana yang digunakan untuk membiayai belanja operasional kepegawaian maka semakin kecil persentase dana yang digunakan untuk menyediakan fasilitas sarana dan prasarana masyarakat (Halim, 2012). Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal.

Berikut ini adalah tabel hasil analisis rasio keserasian antara belanja operasi dan belanja modal Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020 – 2021.

Tabel. 2 Perhitungan Rasio Belanja Operasi Tahun Anggaran 2020 – 2021

Tahun	Belanja Operasi	Total Belanja Daerah	Rasio Belanja Operasi (%)
2020	1.727.405.179.222,86	2.392.576.073.246,86	72,19
2021	1.647.219.558.627,47	2.050.044.253.908,86	80,35

Sumber data : Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara 2023 (diolah)

Tabel. 3 Perhitungan Rasio Belanja Modal Tahun Anggaran 2020 – 2021

Tahun	Belanja Modal	Total Belanja Daerah	Rasio Belanja Modal (%)
2020	665.170.894.024,81	2.392.576.073.246,86	27,80
2021	390.900.388.868,39	2.050.044.253.908,86	19,06

Sumber data : Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara 2023 (diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan rasio belanja operasi dan belanja modal di atas dapat menunjukkan bahwa prioritas dari Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan utara dalam mengalokasikan dananya yaitu pada belanja rutin. Hal tersebut terlihat pada tahun 2020 persentase rasio belanja operasi sebesar 72,19 % dan rasio belanja modal hanya sebesar 27,80 %. Begitu pula dengan tahun 2021 persentase belanja rutin yang dikeluarkan oleh pemerintah mengalami peningkatan sebesar 80,35 %. Berbanding terbalik dengan rasio belanja modal yang mengalami penurunan di tahun 2021 yaitu 19,06 %.

Hasil analisis yang dapat dikemukakan berdasarkan tabel di atas yaitu Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara masih sangat sangat memprioritaskan sebagian besar pendapatannya untuk belanja yang menyangkut dengan aktivitas pemerintahan seperti belanja pegawai serta barang dan jasa. Pemerintah belum begitu memperhatikan pembangunan yang ada di daerahnya. Hal tersebut disebabkan oleh belum adanya patokan yang ideal tentang persentase yang harus dikeluarkan untuk belanja modal maupun belanja operasi. Dengan demikian, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara mempunyai peranan yang sangat penting dalam hal memperhatikan pengeluaran yang akan digunakan untuk membiayai daerahnya, disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan yang dapat dimanfaatkan sebagai pelayanan masyarakat Provinsi Kalimantan Utara.

4. Conclusion

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan analisis yang telah dilakukan oleh penulis sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Kinerja belanja daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara selama tahun 2020 dan 2021 jika di analisis menggunakan rasio pertumbuhan belanja menunjukkan adanya pertumbuhan belanja positif. Belanja yang mempengaruhi jumlah kenaikan pertumbuhan belanja adalah belanja kepegawaian.
- Dari hasil analisis kinerja belanja daerah menggunakan perhitungan rasio keserasian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020 dan 2021 dalam mengalokasikan dananya untuk kegiatan lebih memprioritaskan pada belanja operasi yaitu sebesar 72,19 % dan 80,35 % yang perbandingannya jauh lebih besar dengan belanja modal yang hanya sebesar 27,80 % dan 19,06 %.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan dengan memperhatikan hal – hal yang menjadi keterbatasan penulis dalam melakukan penelitian ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara masih perlu meningkatkan kinerja dalam hal pengelolaan belanja daerah agar tercipta kinerja yang baik dengan efektifitas, efisiensi, dan produktifitas belanja yang semakin baik pula.
2. Pemerintah daerah perlu memberikan perhatian lebih kepada hal – hal yang menjadi bagian dari belanja modal, karena adanya belanja modal dapat menambah aset yang berguna dalam jangka waktu lebih dari satu tahun. Serta meningkatnya penilaian kinerja pemerintah juga dapat melalui pelayanan masyarakat yang baik.
3. Penelitian ini memiliki jangka waktu tahun anggaran yang terbatas yaitu hanya tahun 2020 sampai dengan 2021. Di harapkan peneliti selanjutnya dapat menambahkan jangka waktu yang lebih lama agar penelitian yang dilaksanakan mendapatkan hasil yang lebih akurat dalam melakukan analisis kinerja belanja pemerintah daerah provinsi Kalimantan utara.
4. Peneliti selanjutnya diharapkan mampu menambah alat analisis yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan utara dan juga memperluas ruang lingkup penelitian yang tidak hanya mengambil satu provinsi di Indonesia yaitu Provinsi Kalimantan Utara.

References

- Andriani, I. (2020, Agustus). Analisis Kinerja Belanja Daerah Di Kabupaten Sarolangun. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan (Menkeu)*, 9(2).
- Assidiqi, B. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012. *Jurnal Profita Edisi 5*.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory of Agency Theory : CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hendriyani, R., & Tahar, A. (2015). Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, 22(1).
- Kriyantono, R. (2007). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Pramono, J. (2014). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta). 7(13).
- Putri, F. C. (2023, Januari). Interpretasi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2019-2021. *Jurnal Ekonomika*, 14(1).
- Putri, F. C. (2022). Kondisi Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Maneksi*.
- Ritonga, I. T. (2014). Developing A Measure Of Local Government's Financial Condition. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 142-164.
- Sholikhah, I., & Wahyudin, A. (2014). Analisis Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa. *Accounting Analysis Journal*, 3(4).